

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini Pemerintah Desa Mata Air belum sepenuhnya mengelola perencanaan keuangan Desa Mata Air sesuai dengan Pemandagri No. 20 Tahun 2018.

- a. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan keuangan desa sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan sebuah desa tetapi di Desa Mata Air masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes. Musrenbangdes tentang perencanaan di Desa Mata Air hanya melibatkan aparat desa, BPD dan Kadus tidak melibatkan Masyarakat.
- b. Transparansi perencanaan keuangan desa Mata Air sudah dipaparkan secara lugas kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung bentuk program dan jumlah anggaran yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam perencanaan keuangan desa pemerintah desa menerapkan jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD tetapi tidak melibatkan unsur masyarakat mampu menyinkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Mata Air.

6.2 Saran

- a. Untuk pemerintah Desa Mata Air diharapkan melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan keuangan desa dan peningkatan pemahaman dan

penggunaan system informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan pelatihan-pelatihan kepada aparatur desa dalam menunjang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

- b. Untuk masyarakat Desa Mata Air diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dia ambil pemerintah desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di desa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa seperti halnya kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian internal, system informasi akuntansi dan factor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Yunilasi, (2020): *Analisis Penganggaran Keuangan Desa (studi kasus Pemerintahan Nagari IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo)* . Universitas Andalas
- Astawa dan Budiasih, 2019: *Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Pek*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol 14
- Baihaqi, Sari, Ratih Pelita, S, Dri Asmawati, 2017: *Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)*. Jurnal Akuntansi Vol. 7
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, (2016): *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumanjang, Kabupate Lumanjang)*. Universitas Jember
- Mamuaya, Sabijono dan Gamaliel, 2017: *Analisis Pengelolaan Desa Berdasarkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupate Bolaang Mongondow Selatan)*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
- Mardiasmo, 2014: *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16
- Peraturan Desa No. 3 Tahun 2021: Tentang APBDes Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Desa. 4 Tahun 2020: Tentang APBDes Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018: Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007: Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rafika, Rahma, (2019): *Analisis Penganggaran Keuangan Desa (studi kasus pada Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman)*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
- Rini dan Utomo, (2019): *Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (studi pada dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)*. JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta, 5(1), 132-143.

Sujarweni, 2014: *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, 2015: *Teori Perencanaan Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014: Tentang Desa

Widjaja, 2003: *Teori Otonomi Desa*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.